

Pertarungan Wacana dalam Pemberitaan Pengiriman Siswa Ke Barak Militer: Kajian Leksikal Kritis Roger Fowler

Nurita Ismawati^{1*}, Agus Purnomo², Ahmad Putikadyanto³

Email: nuritamawwaa@gmail.com

Universitas Islam Negeri Madura

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengungkap pertarungan wacana dalam pemberitaan kebijakan pengiriman siswa ke barak militer oleh Dedi Mulyadi melalui pendekatan analisis wacana kritis Roger Fowler. Media massa tidak hanya menjadi sarana penyampai informasi, tetapi juga ruang ideologis yang membentuk cara pandang publik melalui pilihan leksikal tertentu. Fokus kajian ini terletak pada aspek leksikal kritis berupa pertarungan wacana. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan data berupa artikel berita daring yang memuat narasi terkait kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam wacana media terjadi pertarungan makna yang ditandai oleh diksi dan struktur leksikal yang beragam. Dedi Mulyadi direpresentasikan dalam citra populis, nasionalis, dan pro-rakyat pada satu sisi, namun juga muncul narasi yang mempertanyakan efektivitas dan legitimasi kebijakan tersebut. Pertarungan ini mencerminkan adanya kepentingan ideologis yang tersembunyi dalam struktur bahasa media. Temuan ini menegaskan bahwa wacana media bersifat tidak netral dan berperan aktif dalam membentuk opini publik terhadap kebijakan politik melalui strategi leksikal tertentu.

Kata kunci: Pertarungan Wacana; Strategi Leksikal; Ideologi Media; Roger Fowler

***Abstract.** This study aims to reveal the discourse contestation in the news coverage of Dedi Mulyadi's policy of sending students to military barracks using Roger Fowler's critical discourse analysis approach. Mass media does not merely serve as a channel for conveying information but also functions as an ideological space that shapes public perception through specific lexical choices. This study focuses on critical lexical aspects, discourse contestation. The method employed is descriptive qualitative with data sourced from online news articles narrating the policy. The findings show that media discourse reflects a contestation of meaning, indicated by diverse diction and lexical structures. Dedi Mulyadi is portrayed as a populist, nationalist, and pro-people figure in some narratives, while others question the effectiveness and legitimacy of the policy. This discursive struggle highlights the presence of ideological interests embedded within the media's linguistic structures. These findings affirm that media discourse is not neutral and plays an active role in shaping public opinion on political policies through particular lexical strategies.*

***Keywords:** Discourse Contestation; Lexical Strategy; Media Ideology; Roger Fowler*

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memegang peran strategis dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan. Setiap kebijakan yang diambil, terutama pada sektor pendidikan, kerap menimbulkan reaksi yang beragam di tengah masyarakat. Kehadiran media online sebagai sumber informasi utama dalam masyarakat digital saat ini menjadikan pemberitaan atas kebijakan tersebut sangat berpengaruh dalam membentuk opini

publik. Kata-kata yang dipilih dapat menciptakan citra positif atau negatif terhadap ideologi tersebut (Wardani et al., 2023). Media menjadi kunci komunikasi politik yang dilakukan oleh para aktor politik. Selama ini masyarakat mengonsumsi berita tanpa tahu sumber dan bagaimana berita tersebut dikelola hingga bisa disampaikan kepada masyarakat (Aisyi & Adnan, 2024). Bahasa dalam pemberitaan bukan sekadar alat komunikasi, melainkan representasi ideologi yang dapat membingkai cara pandang masyarakat terhadap suatu kebijakan.

Salah satu fenomena kebijakan yang menimbulkan diskursus publik adalah keputusan Dedi Mulyadi, selaku Bupati Purwakarta, untuk mengirimkan siswa-siswa sekolah ke barak militer sebagai bagian dari program pendidikan karakter. K.M Smith dalam Peradilan S.C.S (2017) mengakui bahwa segala instrumen yang berkaitan dengan HAM internasional berada pada jantung anak-anak. Dengan demikian, ini menjadi suatu kewajiban yang penting dilaksanakan oleh negara dalam melindungi hak asasi anak melalui hukum maupun HAM, untuk mencapai generasi muda yang unggul sebagai penerus nilai-nilai bangsa Indonesia (Priatiningsih, 2023). Kebijakan ini memicu beragam respons di kalangan masyarakat serta media. Sebagian pihak menilai kebijakan ini sebagai langkah progresif dalam membentuk kedisiplinan peserta didik, sementara sebagian lainnya mengecamnya sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang berpotensi menimbulkan trauma dan militerisasi dalam pendidikan.

Dalam situasi tersebut, media massa tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi turut serta membentuk dan mengarahkan konstruksi sosial melalui pemilihan diksi, struktur kalimat, dan strategi penyajian berita yang digunakan. Bagi seorang analisis, penyajian suatu teks atau wacana dalam sebuah media mengusung pihak mana yang paling kuat dan pihak mana yang paling lemah (Rahman & Hamdani, 2023). Selain di tengah persaingan antar media daring, terdapat kecenderungan penggunaan bahasa yang cenderung persuasif, sensasional, dan berpihak, yang pada gilirannya menghasilkan pertarungan wacana dalam pemberitaan. Kosakata pertarungan wacana dimana setiap pihak dalam suatu pemberitaan memiliki pendapat atau versi mereka sendiri tentang masalah tersebut (Fowler, 2025). Representasi yang dikonstruksi oleh media dapat menampilkan keberpihakan terhadap salah satu sisi wacana, baik yang mendukung maupun yang menolak kebijakan tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan kritis mengenai netralitas media serta dampaknya terhadap pembentukan opini publik.

Pendekatan Roger Fowler menitikberatkan pada empat aspek utama dalam analisis teks media, yakni: klasifikasi (*classification*), pembatasan akses pengetahuan (*restricted access to knowledge*), pertarungan wacana (*discourse struggle*), dan marjinalisasi (*marginalization*) (Eriyanto, 2006). Pilihan kosakata dalam pemberitaan tidak bersifat netral, melainkan merefleksikan sudut pandang dan kecenderungan ideologis media (Qura et al., 2024). Misalnya, istilah “*pendidikan karakter*” cenderung memberi legitimasi terhadap kebijakan, sedangkan “*militerisasi anak*” menunjukkan kritik atas tindakan tersebut. Polarisasi ini mencerminkan adanya pertarungan wacana antara narasi yang mendukung kedisiplinan dengan narasi yang menuntut perlindungan hak anak. Hak atas pendidikan dasar tidak terlepas dari keberadaan anak sebagai aset bangsa. Pendidikan dasar dan anak merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain dalam memajukan kualitas suatu bangsa. Oleh karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap hak anak atas pendidikan dasar menjadi hal yang sangat penting (Ariany et al., 2023).

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini memfokuskan perhatian pada bagaimana media menggunakan strategi linguistik untuk memposisikan kebijakan pengiriman siswa ke barak militer dalam kerangka ideologi tertentu. Melalui pendekatan analisis wacana kritis, khususnya pendekatan leksikal yang dikembangkan oleh Roger Fowler, penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana kosakata tertentu digunakan untuk membingkai wacana, mengonstruksi pertarungan ideologi yang tidak sejalan dengan dominasi narasi utama (Brian et al., 2024). Semua agen sosial, sejauh dimungkinkan oleh keadaannya, selalu berusaha menggapai kuasa dengan cara menciptakan realitas melalui kata-kata (Marhamah, 2024). Hal di atas menunjukkan bahwa kosakata merupakan alat dalam pertarungan wacana. Mereka memiliki klaim kebenaran dasar pembenar dan penjelas mengenai suatu masalah. Bahkan mereka bukan hanya mempunyai versi yang berbeda, tetapi juga berusaha agar versinya/tindakannya yang dianggap benar dan lebih menentukan dalam mempengaruhi opini publik (Suharyo, 2018).

Penelitian oleh (Rohamtullah & Setiawati, 2025) berjudul *Kuasa dan Wacana: Mengurai Ideologi Politik Pemberitaan Tentang ‘Peringatan Darurat’ pada Detiknetwork* menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis model Fairclough, yang diperkaya dengan teori kosakata Roger Fowler. Penelitian ini menemukan bahwa Detiknetwork membentuk opini publik melalui kosakata klasifikasi, pembatasan pandangan, pertarungan wacana, dan marjinalisasi, serta menampilkan representasi yang

memperkuat dominasi pemerintah dan mereduksi tuntutan publik sebagai fenomena sesaat. Strategi framing digunakan untuk mengonstruksi narasi stabilitas dan mengaburkan masalah struktural seperti intervensi elit dalam revisi UU Pilkada. Penelitian tersebut memperlihatkan bagaimana bahasa media bekerja sebagai alat ideologis dalam dinamika politik kontemporer.

Penelitian sebelumnya belum secara khusus menyoroti bagaimana media membingkai pertarungan wacana dalam kebijakan pendidikan kontroversial. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis pertarungan wacana pro dan kontra terhadap pengiriman siswa ke barak militer, menggunakan pendekatan leksikal kritis Roger Fowler untuk mengungkap konflik ideologis yang tersembunyi di balik pilihan bahasa media.

Penelitian ini diharapkan dapat memperlihatkan bahwa media bukan hanya ruang informasi, melainkan arena ideologis yang sarat kepentingan. Temuan ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam kajian wacana kritis, serta mendorong kesadaran publik untuk lebih kritis dalam membaca pemberitaan, khususnya ketika menyangkut isu-isu sensitif seperti pendidikan, anak, dan kekuasaan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali makna, pemahaman, serta interpretasi mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk menguraikan secara sistematis dan faktual karakteristik fenomena yang menjadi fokus kajian, sehingga mampu menyajikan gambaran yang objektif sesuai dengan konteks data empiris yang diperoleh (Sugiyono, 2022). Desain penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pertarungan wacana pro dan kontra dalam pemberitaan media daring mengenai kebijakan pengiriman siswa ke barak militer oleh Dedi Mulyadi. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin memahami makna ideologis di balik pemilihan bahasa dalam teks media.

Sumber data dalam penelitian ini adalah teks berita daring yang secara langsung memuat narasi kebijakan serta respons yang muncul dari berbagai pihak. Pemilihan data dilakukan secara purposif, dengan mempertimbangkan relevansi isi berita terhadap isu pertarungan wacana. Artikel yang dianalisis dipublikasikan oleh media arus utama selama periode polemik kebijakan berlangsung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik baca dan catat. Peneliti membaca berita-berita daring secara teliti dan mencatat bagian-bagian

yang menampilkan wacana dukungan maupun penolakan terhadap kebijakan tersebut. Instrumen dalam penelitian ini berupa tabel klasifikasi data yang memuat kategori wacana pro, kontra, dan bentuk kebahasaan yang digunakan dalam konstruksi wacana.

Analisis data menggunakan teori analisis wacana kritis model Roger Fowler dengan fokus pada aspek pertarungan wacana (*discourse struggle*) (Eriyanto, 2006). Proses analisis dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: (1) identifikasi data yang menunjukkan keberpihakan atau penolakan, (2) analisis pilihan leksikal dan diksi yang digunakan media untuk membingkai masing-masing posisi, dan (3) interpretasi ideologi yang tersembunyi di balik representasi tersebut. Hasil analisis diharapkan mampu mengungkap bagaimana bahasa digunakan media untuk membentuk dan mempertentangkan makna dalam ruang publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wacana Legitimasi Pro Kebijakan

Media massa berperan sebagai aktor ideologis yang mereproduksi realitas sosial melalui bahasa, yang tidak bersifat netral, melainkan sarat dengan kepentingan ideologis tertentu. Dalam konteks kebijakan pengiriman siswa ke barak militer oleh Dedi Mulyadi, pemberitaan media memperlihatkan pertarungan wacana yang jelas antara dukungan dan penolakan. Ideologi dan kekuasaan tercermin lewat teks. Teks dibentuk dalam suatu praktek diskursus, suatu praktek wacana. Teks itu hadir dari bagian representasi yang menggambarkan tujuan tertentu. Dalam teks sebuah berita bukan hanya aspek kebahasaan yang diuraikan, tetapi juga dihubungkan dengan konteks. Konteks yang dimaksud adalah bahasa yang dipakai untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu analisis wacana kritis digunakan untuk membongkar kuasa dan ideologi dalam setiap bahasa (Rahmaniar et al., 2021). Pendekatan leksikal kritis Roger Fowler menjadi sangat relevan untuk mengungkap bagaimana bahasa media membentuk dan melegitimasi kebijakan tersebut.

Fowler (1991) menegaskan bahwa “*language is not a transparent medium for reflecting reality, but a constitutive practice that shapes our understanding of the world.*” Dengan kata lain, bahasa media bukan hanya menggambarkan realitas, tetapi juga membentuk realitas sosial dan ideologi yang melingkupinya. Dalam pemberitaan pro kebijakan pengiriman siswa ke barak militer, media menggunakan pilihan diksi dan strategi leksikal yang secara sadar mengandung muatan ideologis untuk melegitimasi kebijakan tersebut.

Tabel 1. Pertarungan Wacana Pro/Setuju (Kebijakan Barak Militer)

No.	Sumber Media	Kutipan Leksikal	Strategi Leksikal	Indikasi Ideologi
1.	Detik.com - <i>Mengintip Pendidikan Karakter Ala Militer Inisiatif Gubernur Jabar Dedi Mulyadi</i>	"bela negara", "wawasan kebangsaan", "kedisiplinan", "keagamaan"	Glorifikasi nilai-nilai militeristik	Mengidealisasi pendekatan otoriter sebagai solusi masalah sosial
2.	Tribunnews - <i>Tegas! Dedi Mulyadi Tidak akan Hentikan Program Pendidikan Siswa di Barak Militer. Ini Alasannya</i>	"para nyinyir dan pembenci", "menjadikan politik sebagai tujuan hidupnya", "tidak memiliki semangat nasionalisme", "mempertuhankan politik", "bukan bentuk militerisasi", "Sekolah Kebangsaan Jawa Barat Istimewa"	Polarisasi dikotomis (pro-nasionalisme vs anti-nasionalisme), delegitimasi kritik sebagai kepentingan politik dan sakralisasi program melalui branding "kebangsaan"	Mengonstruksi narasi defensif-nasionalis yang memosisikan kritik sebagai anti-nasionalisme, sekaligus melegitimasi militarisasi pendidikan melalui retorika "kepentingan bangsa di atas politik"
3.	Republika - <i>Menteri Pigai Nilai Program Dedi Mulyadi Kirim Anak Nakal ke Barak Militer tak Langgar HAM</i>	"bukan merupakan corporal punishment", "bagian dari pendidikan pembentukan karakter", "tidak menyalahi standar HAM", "sesuai dengan prinsip dan standar HAM", "dampak positif terhadap peningkatan kedisiplinan"	Legitimasi melalui otoritas resmi (Menteri HAM), redefinisi konseptual, dan validasi legal-formal	Mendukung program dengan strategi legitimasi otoritatif dan legal, memosisikan kebijakan sebagai sesuai standar HAM internasional untuk meredam kritik

Pemberitaan *Detik.com* dengan judul *Mengintip Pendidikan Karakter Ala Militer Inisiatif Gubernur Jabar Dedi Mulyadi*, menggunakan diksi seperti "bela negara", "wawasan kebangsaan", "kedisiplinan", dan "keagamaan". Pilihan kata ini membingkai kebijakan barak militer sebagai bentuk pendidikan karakter yang bernilai nasional dan religius. Pilihan leksikal ini merupakan bentuk *ideological embedding* menurut Fowler (1991), di mana pilihan diksi merepresentasikan nilai-nilai dominan nasionalisme, religiusitas, dan kedisiplinan untuk melegitimasi kebijakan.

Framing tersebut menampilkan glorifikasi nilai-nilai militeristik sekaligus mengidealisasi pendekatan otoriter sebagai solusi masalah sosial. Dalam kerangka analisis wacana kritis, hal ini mencerminkan kerja ideologi dalam teks (Fairclough, 1995), di mana media menghadirkan kebijakan seolah sebagai kepentingan kolektif bangsa, bukan sekadar program lokal (Rahmaniar et al., 2021). Penekanan pada diksi nasionalis-religius ini menjadikan kebijakan tampak niscaya, bahkan dilegitimasi sebagai upaya menyelamatkan

identitas bangsa. Dengan begitu, bahasa berfungsi hegemonik untuk membentuk penerimaan publik.

Pemberitaan *Tribunnews* berjudul *Tegas! Dedi Mulyadi Tidak akan Hentikan Program Pendidikan Siswa di Barak Militer, Ini Alasannya*, menggunakan diksi seperti “*para nyinyir dan pembenci*”, “*tidak memiliki semangat nasionalisme*”, “*bukan bentuk militerisasi*”, dan “*Sekolah Kebangsaan Jawa Barat Istimewa*”. Pilihan kata ini menunjukkan strategi polarisasi dikotomis (pro-nasionalisme vs anti-nasionalisme) yang sekaligus mendelegitimasi kritik sebagai kepentingan politik. Framing ini juga memperlihatkan sakralisasi program melalui branding kebangsaan, seolah kebijakan tidak boleh dipersoalkan karena menyangkut identitas nasional. Dalam kerangka teori framing Entman (1993), media menonjolkan aspek tertentu (nasionalisme, kepentingan bangsa) dan menutupi aspek lain (risiko militerisasi) demi mengarahkan cara pandang publik (Gunawan, 2024). Realitas kebijakan dibingkai secara selektif untuk menekankan legitimasi nasionalisme, mengaburkan potensi risiko militerisasi, dan membentuk opini publik yang mendukung kebijakan atas dasar kepentingan bangsa.

Pemberitaan *Republika* berjudul *Menteri Pigai Nilai Program Dedi Mulyadi Kirim Anak Nakal ke Barak Militer tak Langgar HAM*, menggunakan diksi seperti “*bukan merupakan corporal punishment*”, “*bagian dari pendidikan pembentukan karakter*”, dan “*sesuai dengan prinsip dan standar HAM*”. Pilihan kata ini membangun legitimasi melalui otoritas resmi (Menteri HAM), disertai redefinisi konseptual dan validasi legal-formal.

Strategi framing ini menampilkan kebijakan seolah sesuai dengan standar HAM internasional, sehingga kritik dapat direduksi. Dalam perspektif analisis wacana kritis, praktik ini mencerminkan penggunaan legitimasi otoritatif dan legal untuk mendukung program. Media tidak sekadar melaporkan, melainkan menyusun narasi ideologis bahwa kebijakan barak adalah sah, legal, dan sesuai dengan norma global (Eriyanto, 2006). Realitas kebijakan dibingkai secara selektif untuk menekankan kepatuhan hukum, mengaburkan dimensi kontroversial, dan membentuk opini publik bahwa program layak diterima serta tidak bermasalah secara HAM.

Melalui pilihan leksikalnya, *Detik.com*, *Tribunnews*, dan *Republika* menampilkan pola legitimasi yang berbeda, tetapi tetap berorientasi pada kepentingan ideologis yang sama, melanggengkan kebijakan barak militer sebagai solusi sah. *Detik.com* mengintegrasikan nasionalisme-religius untuk membungkus kebijakan dengan nilai moral dan spiritual,

Tribunnews membangun oposisi biner yang mendeligitimasi kritik dengan label “anti-nasionalisme”, dan *Republika* mengedepankan legalitas formal guna mereduksi isu pelanggaran HAM.

Perbedaan strategi ini justru memperlihatkan bagaimana media bekerja dalam orbit kekuasaan, mereka tidak netral, melainkan menjadi agen hegemonik yang mereproduksi wacana negara. Dengan membingkai kebijakan sebagai bagian dari “*kepentingan bangsa*” dan “*identitas nasional*”, media mengaburkan dimensi problematis, risiko militerisasi, pendekatan otoriter, dan represi, serta menghadirkan narasi tunggal yang sulit ditentang. Analisis ini memperlihatkan kerja ideologi dalam teks, bahasa dipakai bukan hanya untuk melaporkan realitas, tetapi untuk mengonstruksi realitas yang menguntungkan kepentingan dominan dan menundukkan potensi wacana tandingan.

Wacana Resistensi Kontra Kebijakan

Dinamika pertarungan wacana dalam media massa juga memperlihatkan sisi penolakan terhadap kebijakan pengiriman siswa ke barak militer. Penolakan ini mencerminkan adanya resistensi ideologis yang termanifestasi melalui representasi bahasa yang mengandung kritik terhadap pendekatan koersif dalam pendidikan. Sejumlah media menghadirkan perspektif yang menyoroti dampak negatif kebijakan dari sudut pandang psikologis, hukum, dan hak asasi manusia, dengan mengedepankan narasi yang merefleksikan kerentanan anak sebagai subjek didik. Dalam konteks ini, media tidak hanya menyampaikan kritik secara eksplisit, melainkan juga membingkai kebijakan melalui pilihan leksikal yang menandakan pelanggaran prinsip-prinsip demokratis dan nilai-nilai pedagogis humanis.

Analisis ini sejalan dengan pendekatan analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Fowler (1991) dan Fairclough (1995), yang memandang bahasa sebagai praktik sosial yang tidak netral, melainkan sarat ideologi (Fauzi, 2022). Melalui kerangka ini, dapat dipahami bahwa representasi media terhadap wacana kontra bukanlah cerminan objektif realitas semata, tetapi produk konstruksi wacana yang mengandung resistensi terhadap dominasi kekuasaan dalam ranah kebijakan pendidikan.

Dinamika ini memperlihatkan bahwa wacana kontra hadir bukan hanya sebagai catatan kritis, melainkan sebagai upaya melawan dominasi ideologi yang dibangun melalui narasi pro-kebijakan. Kehadiran resistensi menunjukkan bahwa media juga menjadi ruang di

-----Vol 8, Nomor 2 Bulan Oktober Tahun, Halaman 600-612-----

mana bahasa dipakai untuk menantang klaim hegemonik negara, sekaligus menegaskan adanya pertarungan makna dalam ranah kebijakan pendidikan.

Tabel 2. Pertarungan Wacana **Kontra/Tidak Setuju** (Kebijakan Barak Militer)

No.	Sumber Media	Kutipan Leksikal	Strategi Leksikal	Indikasi Ideologi
1.	Kompas.com - <i>1 Siswa Kabur Saat Dikirim ke Barak TNI, Pengamat: Berisiko untuk Psikologis Anak</i>	"kontra-produktif dan malah memperburuk kondisi psikologi anak", "yang dibutuhkan siswa bukan barak, tapi ruang belajar yang memulihkan", "pendekatan harus bersifat pedagogis dan reflektif, bukan koersif", "pendisiplinan sejati lahir dari kesadaran dan bukan ketakutan"	Kontrasifikasi (barak vs ruang pemulihan), delegitimasi pendekatan militer melalui otoritas akademis, dan dikotomi koersif vs pedagogis	Mengadvokasi pendekatan humanis-psikologis dengan menolak militarisasi pendidikan, memposisikan pendidikan berbasis ketakutan sebagai kontraproduktif terhadap perkembangan anak
2.	CNN Indonesia - <i>Natalius Pigai: Dedi Mulyadi Kirim Siswa ke Barak Tidak Langgar HAM</i>	"tidak melanggar HAM", "bukan corporal punishment", "dididik mental, karakter, disiplin", namun "tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara", "mengakarnya kultur kekerasan di tubuh TNI", "tidak hanya keliru tetapi juga berbahaya"	<i>Balanced reporting</i> - menyajikan suara pro (Pigai) dan kontra (Bonnie Triyana, Imparsial) dalam satu berita	Netral-objektif dengan kecenderungan kritik melalui pemberian porsi lebih besar pada argumen kontra dan data kekerasan TNI
3.	Tempo - <i>Kontroversi Kebijakan Dedi Mulyadi: dari Barak Militer hingga Vasektomi</i>	"nakal itu kriminal", "ini bukan lagi soal kenakalan, melainkan kriminalitas", "memangnya mau dikemanakan lagi?", "mau melangkah atau tidak?", "silakan membuat konsep lain", "anaknya kebanyakan, ha-ha-ha"	Konfrontasi langsung melalui wawancara investigatif dengan pertanyaan provokatif dan membiarkan narasumber mengekspresikan pandangan kontroversialnya	Mengekspos ideologi otoriter-populis Dedi Mulyadi dengan membiarkannya berbicara, sehingga pembaca dapat melihat sendiri problematika logika kebijakan yang simplistic dan berpotensi melanggar HAM

Pemberitaan Kompas.com dengan judul *Siswa Kabur Saat Dikirim ke Barak TNI, Pengamat: Berisiko untuk Psikologis Anak*, menggunakan diksi seperti “kontra-produktif”, “memperburuk kondisi psikologi anak”, dan “pendekatan harus bersifat pedagogis dan reflektif, bukan koersif”. Pilihan kata ini menyoroti dampak psikologis sekaligus membingkai

kebijakan barak sebagai bentuk koersivitas yang berlawanan dengan prinsip pendidikan humanis. Strategi leksikal ini menampilkan oposisi ideologis melalui kontrasifikasi (barak vs ruang pemulihan), dikotomi koersif vs pedagogis, dan delegitimasi pendekatan militer lewat otoritas akademis.

Framing tersebut tidak sekadar menyampaikan kritik, tetapi mengadvokasi alternatif pendidikan yang memulihkan, humanis, dan berbasis kesadaran. Dalam perspektif Fowler (1991), pilihan leksikal seperti ini mencerminkan praktik perlawanan terhadap ideologi dominan, karena media mengonstruksi wacana tandingan yang menolak militerisasi pendidikan (Eriyanto, 2006). Analisis ini menunjukkan bahwa representasi Kompas.com berfungsi sebagai *counter-hegemonic discourse*, yakni menegaskan bahwa pendidikan berbasis ketakutan adalah kontraproduktif bagi perkembangan anak dan bertentangan dengan nilai demokratis serta prinsip pedagogis.

CNN Indonesia dengan judul *Natalius Pigai: Dedi Mulyadi Kirim Siswa ke Barak Tidak Langgar HAM*, menempatkan figur Natalius Pigai sebagai otoritas HAM untuk menegaskan legitimasi kritik sekaligus menampilkan sisi pembelaan terhadap kebijakan. Ungkapan seperti “*tidak melanggar HAM*” dan “*bukan corporal punishment*” menghadirkan klaim netralitas hukum, sementara pernyataan kontra seperti “*tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara*” dan “*mengakarnya kultur kekerasan di tubuh TNI*” menjadi penekanan resistensi. Pola ini mencerminkan praktik *balanced reporting*, di mana suara pro dan kontra dimasukkan dalam satu teks, tetapi secara kuantitas dan intensitas, porsi kontra lebih dominan.

Dalam perspektif Fowler (1991), hal ini merupakan strategi leksikal yang menunjukkan konstruksi wacana selektif, otoritas dipinjam untuk menciptakan kesan objektif, namun sebenarnya diarahkan pada delegitimasi kebijakan. Sementara itu, dengan kerangka Fairclough (1992), terlihat adanya praktik intertekstualitas karena media menjalin suara kelembagaan HAM dan pengamat kritis untuk memperkuat oposisi ideologis (Fitriyani et al., 2024). Dengan cara ini, CNN Indonesia tidak hanya menyajikan laporan netral-objektif, melainkan membangun wacana tandingan yang menempatkan prinsip HAM dan non-kekerasan sebagai rujukan etis melawan narasi koersif negara.

Tempo lebih menekankan konfrontasi langsung terhadap narasi kebijakan. Melalui wawancara investigatif, dengan judul *Kontroversi Kebijakan Dedi Mulyadi: dari Barak Militer hingga Vasektomi*, Tempo membiarkan Dedi Mulyadi mengungkap pandangan

kontroversialnya dengan diksi seperti “*nakal itu kriminal*” dan “*ini bukan lagi soal kenakalan, melainkan kriminalitas*”. Pilihan leksikal ini mengonstruksi wacana yang memperlihatkan orientasi kekuasaan koersif serta simplifikasi masalah sosial menjadi kriminalitas.

Dalam perspektif Fowler (1991), strategi leksikal semacam ini memperlihatkan praktik representasi yang bertujuan membongkar ideologi dominan (Eriyanto, 2006) Tempo tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi mengekspos logika otoriter-populis Dedi Mulyadi dengan menampilkan kata-katanya sendiri, sehingga pembaca dapat menilai problematikanya. Hal ini sekaligus membangun oposisi ideologis terhadap kebijakan barak dengan memosisikannya sebagai bagian dari praktik represif, tidak demokratis, dan sarat kekerasan simbolik. Tempo tampil sebagai media yang lebih ofensif, tidak hanya memosisikan diri sebagai penyampai kritik, tetapi juga sebagai aktor ideologis yang secara eksplisit menantang legitimasi negara dan membuka relasi kuasa di balik kebijakan pendidikan berbasis militerisasi.

Analisis menunjukkan bahwa wacana kontra dalam media tidak hadir sebagai respons spontan, melainkan sebagai konstruksi ideologis yang sistematis. Pemilihan diksi, strategi framing, hingga pemanfaatan otoritas kelembagaan merefleksikan bagaimana media mengartikulasikan nilai demokrasi, hak anak, dan pendidikan humanis sebagai oposisi terhadap wacana koersif negara. Dalam kerangka Fowler, strategi leksikal tersebut bukan sekadar gaya bahasa, tetapi perangkat ideologis untuk menggeser persepsi publik dari legitimasi negara menuju resistensi sosial.

Praktik intertekstualitas yang ditunjukkan melalui pelibatan lembaga seperti Komnas HAM memperlihatkan bahwa media tidak berdiri sendiri dalam mengkritik, tetapi membangun jejaring diskursif yang memperkuat posisi kontra. Realitas sosial yang ditampilkan dalam teks bukanlah refleksi objektif, melainkan hasil produksi makna yang menantang dominasi. Di titik ini, terlihat bagaimana media mengubah dirinya dari sekadar penyampai berita menjadi agen ideologis yang turut serta dalam perebutan tafsir atas kebijakan.

Pertarungan wacana antara narasi negara dan narasi masyarakat sipil menegaskan bahwa media berfungsi sebagai arena hegemoni, tempat ideologi diuji, dipertentangkan, dan disebarkan. Bahasa yang digunakan tidak netral, melainkan sarana kuasa yang dapat mengukuhkan atau menggoyahkan legitimasi. Resistensi yang dibangun lewat representasi

kontra memperlihatkan bahwa ruang publik selalu dipenuhi dinamika, di mana makna tidak pernah tunggal, tetapi senantiasa diproduksi ulang sesuai kepentingan ideologis yang mengiringinya.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pertarungan wacana dalam pemberitaan kebijakan pengiriman siswa ke barak militer melalui pendekatan leksikal kritis Roger Fowler. Hasil temuan menunjukkan bahwa media massa tidak bersifat netral, melainkan arena ideologis tempat kepentingan politik dan sosial diproduksi melalui bahasa. Media yang mendukung kebijakan cenderung membangun legitimasi dengan menekankan nasionalisme, motivasi moral, serta narasi keberhasilan program sebagai wujud pendidikan karakter. Sebaliknya, media yang menolak kebijakan menggunakan strategi pelabelan negatif, mengacu pada otoritas hak asasi, dan menegaskan narasi resistensi untuk menggambarkan kebijakan sebagai tindakan koersif, tidak demokratis, dan tidak ramah anak.

Temuan ini memperkuat posisi teori bahwa bahasa tidak hanya merepresentasikan realitas sosial, melainkan juga membentuk dan mempertahankan struktur ideologis tertentu. Dengan demikian, media berperan aktif dalam memproduksi makna dan membentuk opini publik melalui pemilihan leksikal yang strategis dan sarat ideologi. Urgensi dari penelitian ini terletak pada pentingnya literasi wacana dalam menghadapi kontestasi makna di ruang publik, khususnya dalam isu-isu kebijakan yang menyangkut hak anak dan praktik pendidikan. Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar media massa menjalankan praktik pemberitaan yang berimbang dan mengedepankan prinsip etika jurnalistik. Selain itu, penting bagi masyarakat, akademisi, dan pemangku kebijakan untuk membangun kesadaran kritis terhadap konstruksi wacana dalam media.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek kajian ke media sosial dan platform digital lain dengan pendekatan multimodal, agar dapat menangkap dinamika pertarungan wacana secara lebih utuh dalam konteks mediatik yang interaktif dan kompleks. Pendekatan interdisipliner juga direkomendasikan untuk memperkaya analisis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyi, S. R., & Adnan, M. (2024). Upaya Tvri Dalam Menjaga Netralitas Pada Masa Kampanye Pemilihan Presiden 2024 (*Studi Kasus : Program Acara Pilihan Rakyat*). 2024.
- Ariany, F., Ningsih, M., & Garnika, E. (2023). Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar Berdasarkan Perspektif Hukum. *Empiricism Journal*, 4(1), 175–180. <https://doi.org/10.36312/ej.v4i1.1158>
- Brian, F., Ekaristiano, H., & Sulistyowati, R. (2024). *The language production strategy : An effort to prevent social disorders and control community behavior during the COVID-19 pandemic*. 8(December 2019), 74–84.
- Eriyanto. (2006). *No Title*. PT. LKiS Pelangi Aksara.
- Fauzi, A. Z. (2022). *Translation Techniques used by Accounting Students in Writing Abstracts*. *Philosophica: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 5(2), 99. <https://doi.org/10.35473/po.v5i2.1878>
- Fitriyani, L., Anshori, D. S., & Kurniawan, K. (2024). Keberpihakan Media Online dalam Konflik Kepemimpinan Lokal: Analisis Wacana Kritis Roger Fowler. *Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 12(1), 87. <https://doi.org/10.24036/jbs.v12i1.127773>
- Fowler, R. (2025). *Kosakata dalam Berita Perampokan : Kajian Wacana Kritis*. 11(1), 816–823.
- Gunawan, A. B. (2024). Explaining civilian control of militarisation in Indonesia: The case of military law amendment. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 28(1), 35–54. <https://doi.org/10.22146/jsp.96894>
- Marhamah, N. A. S. (2024). Teori Roger Fowler dalam Strategi Penggunaan Kosakata dan Tata Bahasa pada Pemberitaan Serambinews.Com. *Advances In Social Humanities Research*, 2(3), 376–386. <https://doi.org/10.46799/adv.v2i3.205>
- Peringatan, T., & Pada, D. (2025). 1, 2 1,2. 7(1), 70–88.
- Priatiningsih, H. (2023). Perlindungan Hak Asasi Anak: Fondasi Bagi Generasi Mendatang yang Unggul. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(09), 752–769. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.612>
- Qura, U., Rahmayanti, I., & Amalia, N. (2024). Dinamika Leksikal di Media Massa Online pada Kasus-Kasus Perundungan di Indonesia: Analisis Wacana Kritis Model Roger Fowler. *Imajeri: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(2), 230–247. <https://doi.org/10.22236/imajeri.v6i2.14340>
- Rahman, E. F., & Hamdani, A. (2023). Strategi Penggunaan Kosakata dan Tata Bahasa pada Berita Media Online Indonesia (Analisis Wacana Kritis Model Roger Fowler). *Metafora: Jurnal Pembelajaran Bahasa Dan Sastra*, 10(1), 13. <https://doi.org/10.30595/mtf.v10i1.17670>
- Rahmaniar, S., Amir, J., Jufri, & Thaba, A. (2021). Representasi Ideologi dan Kekuasaan Teks Berita Virus Corona (Analisis Wacana Kritis Roger Fowler, Dkk.). *JP-BSI: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(2), 76–81.
- sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharyo, S. (2018). Paradigma Kritis Dalam Penelitian Wacana. *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra*, 13(3), 482. <https://doi.org/10.14710/nusa.13.3.482-492>
- Wardani, V., Rustono, & Mardikantoro, H. B. (2023). Analisis Wacana Kritis Model Roger Fowler Dalam Wacana Teks Berita Tentang “Penyerangan Hamas Palestina Terhadap Israel” Dalam Tiga Sumber Berita Online. *Journal Metrum*, 1(1), 58–75.